

ABSTRAK

Pada Surat Edaran Bank Indonesia SEBI No. 14/17/DASP/2012 yang digunakan sebagai dasar bahwa, menggunakan jasa dari pihak ketiga ini diperbolehkan, dan telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 yaitu pengaturan kerjasama dengan pihak lain, yang berisi tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 atas perubahan peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran. Menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) untuk melakukan penagihan hutang dapat menimbulkan kerugian kepada pihak penyewa jasa, dengan melakukan intimidasi dan teror kepada nasabah maka perlu adanya perlindungan kepada nasabah perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur terkait tagihan kredit melalui *debt collector* dan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No.3192 K/Pdt/2012 terkait tagihan kredit melalui *debt collector*.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan menganalisis hukum sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis deksriptif kualitatif.

Perlindungan hukum untuk nasabah kredit sendiri terkait dengan penagihan menggunakan *debt collector* melanggar Pasal 17B Ayat (2) dan Ayat (3) PBI 14/2/PBI/2012. Penagihan tanpa etika juga melanggar Pasal 21 Ayat (1) PBI 14/2/PBI/2012. PBI No. 14/2/PBI/2012 mengatur secara lebih terperinci mengeni penagihan hutang dengan menggunakan *debt collector*. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No.3192 K/Pdt/2012 terkait tagihan kredit melalui *debt collector* disini ditentukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak Standard Chartered Bank telah salah dalam melakukan penagihan kredit macet nasabahnya karena menggunakan cara-cara pendekatan intimidasi dan penekanan yang di dalam PBI Pasal 17B ayat (1) dan (2).

Kata Kunci : perlindungan nasabah, tagihan kredit, debt collector

ABSTRACT

In Circular Letter of Bank Indonesia SEBI No. 14/17 / DASP / 2012 which is used as the basis that, using services from third parties is permitted, and has been regulated in Bank Indonesia Regulation No. 13/25 / PBI / 2011, namely the arrangement of cooperation with other parties, which contains the Prudential Principle for Commercial Banks that hand over as implementation of work to other parties and Bank Indonesia Regulation No. 14/2 / PBI / 2012 for changes in Bank Indonesia Regulation No.11 / 11 / PBI / 2009 concerning the implementation of payment instrument activities. Using the services of a third party (debt collector) to collect debt can cause harm to the renter of the service, by intimidating and terrorizing the customer, it is necessary to protect banking customers. This study aims to determine the form of legal protection for debtor customers related to credit bills through debt collectors and legal considerations in the Supreme Court's decision No.3192 K / Pdt / 2012 related to credit bills through debt collectors.

This research uses a normative juridical approach, which is an approach to analyze the law as a set of normative laws and regulations. The specification of this research is analytical descriptive, which is describing the applicable laws and regulations which are related to legal theories and the practice of implementing the law concerning these problems. The method of data collection is carried out by the study of library documents. The method of data analysis is done by qualitative descriptive analysis.

Legal protection for credit customers themselves related to collections using debt collectors violates Article 17B Paragraph (2) and Paragraph (3) PBI 14/2 / PBI / 2012. Billing without ethics also violates Article 21 Paragraph (1) PBI 14/2 / PBI / 2012. PBI No. 14/2 / PBI / 2012 regulates in more detail about debt collection using the debt collector. In the consideration of the Panel of Judges in the Supreme Court Decree No.3192 K / Pdt / 2012 related to credit bills through the debt collector here it is determined that the actions carried out by the Standard Chartered Bank have been wrong in collecting bad debts of its customers for using methods of intimidation and emphasis which is in the PBI Article 17B paragraph (1) and (2).

Keywords: customer protection, credit bills, debt collectors